

ANALISIS FENOMENA SOSIAL KUASA ELIT DI DUSUN JAMBU SLEMAN YOGYAKARTA

Dwi Listia Rika Tini¹⁾, Nur Inna Alfiah²⁾

¹⁾²⁾FISIP, Universitas Wiraraja Madura

Email: ¹⁾rikatini@wiraraja.ac.id, ²⁾nurinna@wiraraja.ac.id

Abstract

This research is to find out the basis of the power they have so that the actors in sand mining are called elites. Besides that, it is also to find out the capacity of the elites and the pattern of relationships carried out by these elites. The method used is a data collection approach and data collection analysis through observation and interviews. Meanwhile, the data analysis used the Miles and Huberman model, using stages, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results show the capacity of the ruling elite, the existence of the ruling elite is in the classification of the petty bourgeois ruling class or the middle class because managers are the determining elite and management decision making is an extension of entrepreneurs who have business interests. So that the relationship pattern shows the regularity of sand mining management which develops intensive communication between entrepreneurs and managers.

Keywords: *elite, elite power, sand mining*

PENDAHULUAN

Gunung Merapi yang mencakup di wilayah Provinsi Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah menjadi sumber daya utama bagi masyarakat disekitarnya, baik dari segi sumber daya alamnya maupun potensi wisata yang patut untuk dikembangkan. Salah satu sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pasir dan batu, yang merupakan material dari gunung yang keluar saat terjadi erupsi, sebagai komoditas pertambangan. Potensi tambang pasir Merapi tidak dapat dipungkiri aset terbesar Gunung Merapi. Dengan kualitas yang tinggi dan jumlah yang melimpah menjadikan pasir dan batu sebagai tumpuan beberapa warga Merapi untuk mengais rezeki. Menambang pasir bagi sebagian orang merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang. Di Yogyakarta sendiri, khususnya wilayah tambang pasir Cangkringan menjadi tempat yang diyakini memiliki kualitas pasir dan batu terbaik karena lokasinya yang dekat dengan Gunung Merapi sehingga masyarakat setempat

memanfaatkan pasir dan batu tersebut untuk lapangan pekerjaannya dan mengais rezeki.

Di wilayah Cangkringan terdiri dari beberapa desa yang juga memiliki titik-titik penambangan pasir, salah satunya Desa Kepuharjo dengan sumber penambangan utama yakni Kali Gendol yang merupakan sungai tempat perlihtasan lahar dari Gunung Merapi. Desa Kepuharjo berada sekitar 7 km arah utara Kecamatan Cangkringan, Desa Kepuharjo dilalui Sungai Gendol yang berbatasan dengan Desa Glagaharjo. Wilayah Desa Kepuharjo terdiri dari 8 pendukuhan yaitu kaliadem, jambu, petung, kopeng, batur, pagerjurang, kepuh dan manggong. Penelitian ini difokuskan pada Dusun Jambu karena dusun tersebut memiliki pengelolaan pasir yang dianggap cukup baik dibanding dengan wilayah penambangan pasir lainnya. Dusun Jambu ini terdiri dari 4 RT dan 2 RW. Luas Dusun Jambu 594.225 yang terdiri dari luas pekarangan 375.975 dan luas tegalan 218.250. Dengan kondisi geografis seperti itu maka tidak dipungkiri bahwa

kemungkinan terdapat beberapa fenomena yang menarik menyangkut dengan fenomena-fenomena sosial politik, termasuk mengenai kondisi masyarakat, stratifikasi sosial yang ditimbulkan dari adanya praktik penambangan pasir serta kemungkinan konflik-konflik laten yang tidak terlihat dari adanya fenomena tersebut.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi basis kuasa yang dimiliki oleh aktor-aktor yang ada di penambangan pasir bisa dikatakan sebagai elit berdasarkan analisis sumber daya kuasa yang terdiri dari: fisik, ekonomi, normatif, personal (kharisma) dan keahlian. Selain itu juga memetakan aktor dan basis kuasa yang dimiliki elit yang dikelompokkan berdasarkan stratifikasi modal produksi sebagai kelas berkuasa menurut aliran Neo-Marxist yang terdiri dari: *The Big Bourgeoisie/ Upper Class, The Petty Bourgeoisie/ Middle Class, The Working Class/ Lower Class*. Serta mengidentifikasi pola relasi yang dijalankan oleh elit-elit pada penambangan pasir. Sehingga Penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mendalami fenomena kuasa elit pada penambangan pasir Gunung Merapi.

Penambangan pasir dipilih sebagai lokasi penelitian karena ada situasi yang kompleks antara masyarakat dengan para elit di daerah yang penuh dengan sumber daya alam, dalam hal ini semenjak erupsi Merapi tahun 2010 dimana mendatangkan suatu sumber penghasilan yang membuat beberapa pengusaha tergiur untuk melakukan usaha, serta pemerintah setempat dengan cara mengkoordinir masyarakat, yang tentunya juga punya kepentingan tersendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Elite

Terminologi elit sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller dan lain-lain pemikir yang tergolong dalam 'elite theorists', memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu

masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan yang lainnya. (Haryanto, 2005 : 66)

Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elit yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan. Perbedaan pada dasarnya dibedakan atas sumber daya yang dimiliki dari setiap orang yang ada, paling tidak terdapat 5 (lima) tipe sumber daya yakni:

1. *Fisik* ; semakin besar kekuatan fisik yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang berarti yang bersangkutan memiliki sumber daya yang semakin besar yang secara potensial akan lebih mudah memperoleh kepatuhan dari pihak-pihak lain.
2. *Ekonomi* ; semakin besar kapital (alat teknologi, kekayaan, pendapatan, hak milik, dan kontrol atas barang dan jasa) yang dimiliki maka potensi memberi imbalan material pihak lain dan diikuti dengan kepatuhan dari pihak-pihak tertentu juga semakin besar.
3. *Normatif* ; pemegang kekuasaan memiliki kedudukan dominasi yang diciptakan dari nilai-nilai (*values*) yang ada dalam masyarakat atau dalam istilah Gramsci, kekuasaan diperoleh dengan jalan "konsensus" tentang moralitas sosial dengan mudah dibangun di dalam masyarakat, karena pengetahuan tentang moralitas keberagaman masyarakat dikonstruksikan oleh pemegang kuasa (Rozaki, 2004 : 23)
4. *Personal* ; kualitas personal tertentu seperti kharisma yang melekat pada dirinya yang menyebabkan pihak lain tertarik dan patuh kepadanya
5. *Ahli (informasional)* ; sumber ini menunjuk pada penguasaan informasi, pengetahuan, dan keahlian teknis lainnya yang dapat digunakan untuk

memperoleh kepatuhan dari pihak lain.

(Haryanto, 2005 : 45-48)

Sementara stratifikasi masyarakat yang menunjukkan elit tertentu menurut aliran Neo-Marxist lebih merujuk pada penguasaan modal produksi yang terbagi dalam 3 strata, yakni :

1. *The Big Bourgeoisie* ; ‘the capitalist rulling class’ yang menguasai moda produksi terbesar yang ada di masyarakat baik usaha profit maupun non profit.
2. *The Petty Bourgeoisie* ; kelompok yang mempunyai peran dalam proses produksi dengan sub-sub kelompok sebagai berikut : (a) Orang-orang profesional, (b) Orang-orang yang memiliki perusahaan kecil menengah yang tidak masuk dalam kelompok borjuis, (c) Orang-orang yang masuk dalam kelompok yang disebut ‘kelas menengah lama’, (d) Orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang disebut “white collar” atau “service clas”.
3. *The Working Class* ; kelompok yang menjual tenaganya ke pasaran tenaga kerja dengan didikte kepentingan mereka yang tergabung dalam kelompok borjuis yang ada pada lapisan masyarakat paling atas sekaligus pemilik “modal”.

(Haryanto, 2005 : 84-85)

Sementara Bottomore lebih banyak menyebutkan istilah kelas menurut moda produksi dengan sebutan *upper class*, *middle class* dan *lower class*. Ia kemudian memformulasikan inti dari pemikiran Marx sebagai berikut :

1. Antagonisme kelas yang inherent dalam sejarah umat manusia yakni kelas yang berkuasa dengan yang dikuasai
2. Kelas berkuasa identik dengan penguasaan terhadap sarana-saran produksi ekonomi
3. Kontinuitas konflik antar kelas antagonistic dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan produksi

4. Sistem kapitalisme secara jelas memamaparkan dikotomi kelas tersebut akibat polarisasi kelas tanpa muatan nilai-nilai tradisional seperti ikatan keluarga dan sebagainya.

5. Perjuangan kelas pada masyarakat kelas kapitalis (sebagai sistem yang paling maju dalam perspekti materialism historis) akan bermuara pada kemenangan kelas pekerja dan pada akhirnya diikuti masyarakat tanpa kelas.

(Bottomore, 2006 : 25-26)

Terkait dengan konsep elit dan kelas, Bottomore menekankan pentingnya kajian mengenai kelas dan elit yang saling terkait, asumsi ideal bahwa kelas yang berkuasa yang memiliki instrument utama dalam produksi ekonomi cenderung memiliki kohesivitas yang tinggi karena diakibatkan oleh kepentingan yang sama, dan konflik yang sama dengan kelas lainnya. Dengan demikian kelas ini memungkinkan penguasaan sarana politik dalam upaya mempertahankan kekayaan dan statusnya. Bottomore menekankan pula bahwa “ada posisi potensial anatara kepemilikan kekayaan dan sumber daya produktif oleh segilintir kelas atas kepemilikan kekuatan politik, lewat perwakilan oleh massa penduduk (Bottomore, 2006 : 46). Disamping itu pula terkait dengan relasi kelas yang berkuasa dengan kelas yang dikuasai Bottomore juga mengemukakan bahwa terdapat lapisan diluar konsep kelasnya Marx seperti intelektual dan birokrat dikatakan memiliki dan menggunakan kekuasaan yang tertinggi. Menurut Bottomore sistem politik Negara-negara komunis tampak mendekati tipe murni dari “elit penguasa”, yakni suatu kelompok yang, setelah memperoleh kekuasaan dengan dukungan atau persetujuan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat, mempertahankan kekuasaannya terutama dengan keunggulan sebagai satu minoritas atau mayoritas (hal 51).

Menurut Bottomore “elit tidak semata-mata berkuasa dengan menggunakan kekuatan dan penipuan, tetapi, dalam satu segi “mewakili” kepentingan dan tujuan kelompok-kelompok yang berpengaruh dan penting dalam masyarakat. Bottomore menekankan bahwa elit bertitik tolak dari adanya ketidaksamaan bakat-bakat individual dalam setiap lapisan kehidupan sosial. Ia juga menekan eksistensi dari kelas subelit (yang mencakup kelas menengah baru yang terdiri dari; manajer, pegawai negeri, pekerja kerah putih, cendekiawan dan intelektual) sebagai penghubung dari elit dengan masyarakat. Definisi mengenai manajer dan birokrasi ‘jenis kelaminnya’ sangat jelas dengan aspek kepentingan yang mereka kuasai yakni ekonomi dan politik. Namun yang menarik, mendefinisikan intelektual menjadi sebuah kelompok yang agak absurd untuk didefinisikan. Kelompok intelektual bukanlah kelompok berdasarkan keturunan karena syarat masuknya yang kompetitif, meskipun demikian, sumber daya pengetahuan yang dimilikinya membuat elit intelektual lebih cenderung berasosiasi dengan kelas-kelas sosial utama.

Legitimasi kekuasaan elit akan menentukan seberapa lama suatu elit akan bertahan dalam kekuasaannya atau justru terganti oleh kelompok orang lainnya yang disebut dengan perputaran elit. Adanya perputaran elit yang diisyaratkan oleh Pareto dan Mosca menunjukkan bahwa golongan elit nyatanya mengalami perkembangan yang disebabkan oleh proses sosial utama yakni, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi formal/birokrasi, dan perkembangan keragaman moral. Dengan berjalannya keempat proses itu, kaum elit pun menjadi semakin banyak dan semakin beraneka ragam dan bersifat lebih otonom. (Keller, 1984 : 91) Perputaran elit tersebut memaksa para elit untuk berada dalam status quo atau *unity* agar keberadaan dan

kepentingan mereka sama-sama terjaga. Mills mengemukakan untuk melihat *unity* dari kekuasaan elit kita harus memahami 3 hal penting, yakni (a) psikologi dari setiap elit yang terlibat, dimana hal ini menyangkut motivasi, kehidupan sosial, namun menentukan *style* dan posisi dari elit tersebut; (b) struktur dan mekanisme institusional yang secara hirarkis sudah dibangun, bagaimana koneksi diantara para elit tersebut; (c) bukan hanya sekedar psikologis dan struktur komando melainkan lebih dari kordinasi eksplisit diantara para elit (Mills, 1956 : 34).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian berlokasi di Dusun Jambu, Cangkringan, Sleman Yogyakarta. Observasi dilakukan secara langsung di kawasan kaligendol gunung merapi dengan menemui beberapa informan penelitian untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada:

- 1) Pak Poniman, pembeli material yang berprofesi sebagai supir truk dari Kota Klaten
- 2) Pak Larno, ketua kelompok coker yang merupakan warga asli setempat dan memiliki lahan khusus kelompoknya sendiri
- 3) Pak Yaya, coker yang bekerja di lahan perusahaan
- 4) Bu Tini, warga setempat yang berprofesi sebagai coker
- 5) Pak Suroto, operator Bego
- 6) Pak Tohar, sopir truk dari Solo
- 7) Pak Budi, helper Bego

Pengumpulan sumber data primer dan data sekunder pada sesi wawancara dilakukan secara face to face dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada informan untuk menyampaikan informasi terkait aktor-aktor yang ada di kawasan penambangan pasir Dusun Jambu. Selain itu pengamatan dilakukan

dengan merasakan, mendengar dan melihat secara langsung objek penelitian lapangan.

Lebih lanjut data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan model interaktif Miles and Huberman berdasarkan tiga langkah (Sugiono, 2014) diantaranya sebagai berikut ; pertama, peneliti melakukan reduksi data yaitu melakukan seleksi data berdasarkan temuan-temuan di lapangan sesuai dengan tema penelitian kuasa elit terhadap fenomena penambangan pasir. Kedua menyaji data, hal ini dilakukan guna mempermudah proses penarikan kesimpulan berupa basis kuasa aktor sehingga bisa disebut elit, stratifikasi kelas dan pola relasi masing-masing aktor. Ketiga verifikasi, melakukan penarikan kesimpulan yang berkaitan atas jawaban dari rumusan masalah identifikasi kuasa elit terhadap fenomena penambangan pasir di Dusun Jambu.

Selanjutnya penelitian diuji keabsahan datanya agar dapat menakar tingkat ketepatan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari ; triangulasi sumber yaitu cara peneliti mengecek kebenaran sumber informasi lapangan yang dilandasi dengan sumber-sumber lain seperti dokumentasi, jurnal maupun buku. Sementara pada triangulasi teknik dikembangkan dengan membandingkan sumber data yang satu dengan yang lain baik pada proses wawancara, dokumentasi maupun observasi yang berkaitan dengan masalah kuasa elit. Sedangkan pada teknik waktu keabsahan data dilakukan dengan membandingkan ketepatan data pada selang waktu yang berbeda (Sugiono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elit dan Basis Kuasa

Di wilayah Dusun Jambu, Desa Kepuharjo terdapat 5 titik pintu masuk (DO) yang dikelola yakni, JK, Lestari, WP, NA, dan RB. Wilayah penambangan pasir di Dusun Jambu dikenal dengan

istilah tambang rakyat. Menurut penuturan Pak Poniman dan Pak Tohar, sebagai pembeli, mereka dibebaskan memilih lahan dimanapun yang mereka anggap materialnya baik hanya dengan catatan yakni membayar, baik itu memiliki DO (surat izin) ataupun tidak, yang berarti baik itu melalui jalur resmi maupun tidak resmi atau yang disebut dengan istilah *ngemel*¹. Hal terpenting adalah mereka membayar pembelian material dan membayar jasa baik itu kepada pengelola, coker, maupun operator. Hal yang sama juga berlaku jika mereka membeli lewat jalur ilegal, yang terpenting adalah adanya jaringan dengan coker atau operator setempat atau mereka mendapat tawaran mengambil material secara tidak resmi dari calo kelompok-kelompok coker yang sudah menanti mereka jauh sebelum gerbang masuk dusun².

Bagi Pa Larno sebagai *coker* warga asli kampung, sekaligus ketua kelompok coker, ia dan teman-temannya memiliki hak bebas untuk bekerja di penambangan pasir dengan catatan ada kesepakatan kapling dengan pihak desa sebelumnya. Orang-orang dari luar kampung yang notabene bukan warga kampung tersebut, diizinkan untuk bekerja di penambangan Kali Gendol dengan catatan harus izin dengan pemilik kapling tersebut. Kebanyakan *coker* dari luar kampung yang ingin bekerja mendatangi kapling-kapling milik kelompok masyarakat *coker* karena dianggap lebih mudah mendapatkan izin bekerja. Menurut Pak Larno, izin itu diberikan dengan alasan bahwa masyarakat sama-sama mencari kerja dan penghidupan, asal mau mengikuti aturan main yang ditentukan dan tetap membayar pajak/retribusi kepada kelompok *coker* Pa Larno.

Berbeda halnya dengan Pak Larno yang memiliki kemudahan untuk mendapatkan pembeli dari jalur tidak

¹ Istilah yang digunakan untuk memberi sogokan kepada aktor-aktor yang ada di penambangan

² Hasil wawancara dengan Pa Larno, Pa Tohar dan Pa Poniman

resmi, Pak Yaya hanya akan mendapatkan pembeli dari jalur resmi karena merupakan coker pekerja di lahan milik perusahaan namun setiap pembeli membayarkan langsung kepada Pak Yaya sebesar Rp. 300.000,. Upah sebesar Rp. 300.000 kemudian dibagi per orang yang bekerja. Biasanya dalam hari kerja normal, pekerja yang bekerja dalam 1 kapling bisa terdiri dari 5-7 orang *coker* dan dengan pembeli sekitar 4-5 truk yang harga bayarnya tergantung ukuran truk dan asal kota truk tersebut. Untuk ukuran truk kecil/kayu misalnya, hanya seharga kurang dari Rp. 300.000 yang kemudian dibagi untuk upah orang *coker*. Pak Yaya mengatakan, jika dalam sehari 4-5 truk yang datang, maka penghasilan bersih yang bisa dibawa pulang sekitar Rp. 150.000 dengan catatan ia bekerja seharian penuh dari pukul 03.00 hingga sekitar pukul 17.00 sore.

Penambangan pasir di Dusun Jambu sebelumnya dilakukan secara manual oleh warga hingga tahun 2010 pasca erupsi, kemudian beberapa swasta menawarkan kerjasama penambangan dengan menyediakan mesin alat tambang pasir yang disebut warga dengan istilah *Bego* yang dioperasikan oleh seseorang disebut dengan istilah *operator*. *Operator* ini menurut penuturan Ibu Tini, biasanya merupakan warga sekitar atau ada juga yang merupakan karyawan perusahaan, serta pemilik *Bego* terkadang sebulan sekali datang untuk mengontrol ke wilayah penambangan. Yang menjadi menarik, bahwa seorang operator merupakan pihak

yang paling diuntungkan karena sering mendapat uang cash dari proses penambangan baik yang dilakukan secara resmi maupun dari hasil *ngemel*. Selain itu, perlu dicermati bahwa operator berasal dari 2 kalangan, yakni pemuda setempat yang diberi kesempatan untuk belajar terjun dalam penambangan dan orang-orang perusahaan yang ditempatkan yang diawasi oleh mandor.

Keberadaan pengelola menjadi kunci keberlangsungan jalannya praktik bisnis penambangan secara ‘tertib’. Hal ini diakui baik oleh para supir truk pembeli material, operator, coker, maupun masyarakat setempat. Seperti disebutkan oleh Ibu Tini bahwasannya pengelola dianggap memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi kepada masyarakat, termasuk membayar jasa atau pajak tanah warga yang digunakan sebagai pintu masuk penambangan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya legitimasi kuasa dari para aktor yang semakin menunjukkan bahwa merekalah elit-elit yang ada dalam penambangan.

Dapat dikatakan bahwa setiap aktor yang ada dalam penambangan pasir memiliki sumber daya kuasanya masing-masing. Dari hasil paparan diatas, peneliti mendapati bahwa basis kuasa dipengaruhi oleh penguasaan seseorang atau sekelompok orang terhadap sumber daya. Setidaknya jika diklasifikasikan antara sumber daya dan aktor-aktor yang dimaksud akan menghasilkan skema sumber daya kuasa sebagai berikut :

Tabel.1

Basis Kuasa Elit

| Sumber Daya Kuasa | Aktor |
|---------------------|---|
| Fisik | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelola • Bagian Keamanan |
| Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha • Masyarakat Pemilik Tanah • Pengelola |
| Normatif | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah setempat (dusun – desa – kecamatan – kabupaten – provinsi) • Mandor |
| Personal (Kharisma) | <ul style="list-style-type: none"> • Para Kepala Pemerintahan • Pengelola |

| | |
|----------|------------------------|
| Keahlian | • Ketua Kelompok Coker |
| | • Operator |
| | • Coker |

(Sumber : *Olahan Peneliti, 2021*)

Dalam penambangan pasir di Kali Gendol, terdapat ciri khusus untuk menentukan suatu aktor adalah sebuah elit atau bukan dapat dilihat dari modal produksi serta peran dan fungsi dari aktor tersebut apakah seorang penentu kebijakan atau bukan. Hal ini dikarenakan lokasi Kali Gendol merupakan lokasi bisnis penambangan pasir, maka menjadi sangat relevan untuk meninjau modal produksi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat untuk dapat menentukan stratifikasi elit yang ada. Dilihat dari penguasaan modal produksi jelas bahwa *big bourgeois* dipegang oleh perusahaan pemilik kapling dan alat berat, karena masyarakat saat ini sudah kewalahan jika harus mengeruk Kali Gendol secara manual dan sudah bergantung pada keberadaan alat bego. Keberadaan perusahaan ini tentunya ditunjang oleh perizinan yang diurus oleh pemerintah terkait. Dari segi *petty bourgeois*, didapati bahwa pengelola dan pemerintah dusun menjadi elit yang banyak menentukan dalam proses produksi.

Selain itu, berbicara soal wilayah, secara geografis, Kali Gendol yang memiliki potensi pemasukan yang sangat besar bagi pemerintahan setempat dan oleh karenanya mustahil tidak ada campur tangan pemerintah di lokasi penambangan tersebut karena hal ini akan berkaitan langsung dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan, apakah sesuai legitimasi yang ada atau tidak. Elit semacam ini disebut oleh Durkheim sebagai elit strategis. Senada dengan itu, Laswell mengisyaratkan bahwa elit yang paling unggul kedudukannya ialah kelompok yang mempunyai kekuasaan politik; sebab di lapangan politik keputusan-keputusannya disertai sanksi yang kuat, mengikat seluruh masyarakat dan mempunyai daya perekat yang

mengakibatkan nilai-nilai lain mengikutinya (Haryanto, 2005 : 128). Dari hasil penelitian, elit unggul ini ditunjukkan keberadaannya oleh pemerintah dusun dan pengelola sebagai ujung tombak pihak yang memiliki kekuasaan otoritatif terhadap pengelolaan penambangan. Disisi lain, terdapat elit yang sangat berpengaruh meskipun tidak terlihat dilapangan namun memiliki kekuatan yang cukup signifikan, yakni masyarakat pemilik tanah yang merelakan tanahnya dijadikan akses untuk penambangan dengan catatan tentunya ada transaksi bisnis diantaranya.

Sementara itu, beberapa aktor bisa terlihat sangat kecil atau dianggap sebagai kelas yang diatur atau dikuasai namun nyatanya ia juga memiliki kesempatan kuasa yang spektrum kekuasaannya tidak luas dan tidak banyak menentukan, yakni Mandor dan Ketua Coker. Mereka adalah elit yang secara fungsional tidak banyak berpengaruh dalam penentuan keputusan namun secara hirarkis memiliki lingkup massa yang dikuasainya. Mandor menguasai operator dan helper, sedangkan ketua coker menguasai anggota coker lainnya.

Posisi pemerintah dalam hal ini merupakan bagian dari elit namun berada dalam level yang berbeda. Semakin tinggi level pemerintahan maka akan menempati posisi elit yang semakin tinggi. Dalam hal ini level Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta berada bersama pengusaha besar dalam *Big Bourgeoisie*. Hal ini dikarenakan, sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan, otonomi Yogyakarta merupakan otonomi penuh yang diatur dalam pemerintahan berbasis kesultanan dan oleh karenanya, saluran pengusaha yang masuk ke pertambangan sudah dipastikan mendapati izin dari jaringan yang paling tinggi di pemerintahan karena hal ini berkaitan

dengan penghasilan daerah. Yang menarik bahwa pemerintah Provinsi Yogyakarta alias Keraton merupakan kelas penguasa sekaligus elit penentu. Sementara level pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga Dusun bertugas melancarkan kepentingan big borjuis secara legal administratif dan berada dalam level petty borjouis dari segi *white collar/service*

class sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan.

Dari pemetaan aktor dan basis kuasa yang dimiliki, maka elit yang ada dapat dikelompokkan berdasarkan stratifikasi modal produksi sebagai kelas berkuasa serta peran dan fungsi yang dijalankan sebagai elit penguasa sebagai berikut :

Tabel 2.
Stratifikasi Elit di Penambangan

| Kapasitas-Elit Penguasa | Aktor |
|-------------------------|--|
| Manajer | a. Pengelola b. Ketua Coker (hanya mengatur pada lingkup kecil yakni kelompoknya saja) c. Mandor (lingkup kecil – terbatas hanya pada operator dan helper sebagai perpanjangan tangan perusahaan terhadap karyawannya) |
| Birokrasi | d. Pemerintah Setempat (Dusun-Desa-Kecamatan-Kabupaten-Provinsi) |
| Intelektual | a. Operator dan Helper |

(Sumber : Olahan Peneliti, 2021)

Kapasitas dan Pola Relasi antar Elit

Selain identifikasi elit dan basis kuasa yang dimiliki, hal yang penting dalam kajian elit adalah kapasitas yang dimiliki oleh para elit serta relasi diantara para elit tersebut untuk mempertahankan keberlangsungan kuasa dan kepentingannya. Dari hal kapasitas berarti kembali pada klasifikasi elit berdasarkan peran dan fungsi dari elit tersebut, yang

mana hal ini mengindikasikan mana elit yang menjadi elit penentu dan mana elit yang bukan menjadi elit penentu.

Dalam hal ini maka dapat kembali ditentukan antara *manajer, birokrasi dan intelektual*. Secara kapasitas sebagai penentu kebijakan, *intelektual* tidak

termasuk kedalam kelompok elit penentu karena tidak memiliki kekuasaan politik yang dapat melahirkan suatu keputusan yang secara formal dapat dipatuhi oleh seluruh pihak, namun ia termasuk dalam salah satu elit penguasa seperti Operator dan Helper. Diantara *manajer dan birokrasi*, yang paling terlihat jelas aktor yang menentukan keputusan adalah pengelola sebagai manajemen langsung penambangan dengan urusan administratif yang ditentukan oleh pemerintah. Kehadiran pemerintah setempat sebagai elit penguasa dilihat dari keberadaan portal dengan karcis masuk bagi para truk pembeli material dengan kalimat “retribusi”. Selain itu, pemerintah juga hadir dalam bentuk DO atau surat jalan atau surat izin penambangan. Lagi-lagi

seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa keberadaan pemerintah bukan hanya sebatas mengatur secara administratif, melainkan ini berkaitan dengan penghasilan daerah yang tentu saja dibutuhkan oleh setiap pemerintahan baik itu yang masuk dan terhitung secara akuntabel sebagai penghasilan asli daerah maupun yang masuk bagi oknum-oknum pemerintahan yang bertindak sebagai 'beking' atau sekaligus aktor dalam bisnis penambangan. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Tini bahwa kadang pemerintah dusun pun bertindak sebagai pengelola.

Sementara secara legitimasi kuasa, Ketua Coker hanya memiliki legitimasi elit secara personal yang diakui kharismanya oleh anggota coker lainnya sementara Mandor hanya memiliki legitimasi prosedural sesuai sistem hukum formal perusahaan meskipun demikian, keduanya tidak memiliki kapastias dan bukan berperan sebagai elit penentu kebijakan namun termasuk dalam elit penguasa karena menjadi penguasa bagi sebagian kelompok dalam wilayah otoritasnya.

Hal ini menjadi menarik bahwa keberadaan elit penguasa ada dalam klasifikasi kelas penguasa *petty bourgeois* atau *middle class*. Hal ini menegaskan asumsi Bottomore bahwa tidak satupun dalam kelompok ini secara kohesif atau cukup independen berada dalam elit penentu yang stabil. Selain itu, kemungkinan pergantian elit paling besar berada dalam stratifikasi ini. Karena pengelompokan elit penguasa berdasarkan basis kuasa organik (fisik, normatif, personal dan ahli) yang bisa saja berubah akibat proses sosial.

Hal lain yang menarik adalah bahwa keberadaan perusahaan tidak terasa kentara di lokasi penambangan, namun akan terlihat nyata ketika melihat alat berat atau bego yang di badan alat terdapat stiker nama-nama perusahaan. Secara kasat mata perusahaan ini tidak hadir dalam rapat dusun untuk penentuan bagi hasil dan segala urusan mengenai penambangan oleh pengelola. Menurut

pengakuan Ibu Tini, perusahaan masuk melalui *link* pengelola. Bahkan menurut Ibu Tini, pengelola tidak merupakan hasil pilihan masyarakat melainkan tiba-tiba saja ada, hal ini dikarenakan kepandaian pengelola dalam mencari '*link*' dengan pengusaha yang ingin berbisnis di penambangan pasir. 1 *pengelola* itu bisa terdiri dari 3-4orang sementara dalam 1 dusun bisa ada hingga 3-4 *pengelola*. *Pengelola* tersebut pulalah yang mengelola Portal dan mengatur DO dari turk pembeli. *Pengelola* setiap hari setelah tambang ditutup biasanya berkumpul di salah satu rumah yang ada di hutap (hunian tetap) untuk menghitung keuntungan. Artinya, siapapun yang bisa menarik pengusaha maka secara langsung ia akan menjadi pengelola. Pengelola yang tiba-tiba ada ini kemudian diyakini memiliki hubungan baik dengan pemerintah sehingga tidak mendapat hambatan dan tidak sulit untuk membuka kapling-kapling bagi perusahaan sekaligus membawa alat berat perusahaan dengan identitas JK, Lestari, WP, NA, dan RB. Secara tidak langsung pengelola sebagai elit penentu dan pembuat keputusan manajemen penambangan merupakan perpanjangan tangan dari pengusaha yang memiliki kepentingan bisnis.

Disisi lain, keputusan pengelola nyatanya tidak berdiri sendiri, melainkan ada proses komunikasi dan kordinasi dengan pemerintah setempat, hal ini tercermin dalam pernyataan Ibu Tini pun mengatakan bahwa setelah disepakati antara pihak swasta dan pengelola terbentuklah DO yang harus dibayarkan pembeli sebesar 300ribu, biaya tersebut operator (perusahaan+supir bego) yang 1 truknya mendapatkan 120ribu dan sisanya dikembalikan kepada masyarakat yaitu 25% untuk warga, 17,5% karyawan/coker, 15% pengurus yang diketuai oleh Kepala Dusun, 3% Pemuda, 4% sosial, 3% pendidikan seperti Paud, Masjid, dan TPA, serta 25% tersebut diberikan kepada warga yang memiliki tanah untuk menuju ke tempat lokasi penambangan. Uang yang

diperoleh dari DO itu juga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan karang taruna dan PKK. Penjaga Portal berkewajiban mencatat DO yang masuk dan harus teliti baik dari segi jumlah truk, volume material dan bayaran yang diterima. Hasil laporan DO ini, setiap bulannya diberikan oleh *pengelola* kepada dusun dan oleh dusun kemudian diumumkan di forum PKK, sehingga menurutnya masyarakat merasa puas dengan transparansi dari *pengelola*.

Bagi hasil antara *pengelola* dengan dusun, dibagi-bagi lagi dengan pihak desa, RT dan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten. Dusun membentuk kas desa yang masuk dari *pengelola* dan juga kelompok-kelompok *coker* yang

digunakan sebagai dana sosial, misalnya untuk membantu warga yang sakit, memperbaiki jalan desa, dan sebagainya.

Dari hal ini, dapat dilihat bahwa legitimasi kuasa *pengelola* berdasarkan dari legitimasi ideologis yang memiliki kesamaan kepentingan dengan pengusaha dan sekaligus legitimasi instrumental

dengan menjanjikan manfaat konkrit bagi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Sementara pemerintah memiliki legitimasi prosedural yang memiliki implikasi hukum tetap dan menyeluruh serta adanya legitimasi tradisional yang dibenarkan secara moral atau suatu kewajiban atas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Adanya legitimasi ini membuat masyarakat tidak banyak menggugat soal keberadaan elite.

Kekuatan legitimasi para elit menunjukkan adanya pola kerja para elit penguasa ini yang tidak bekerja secara terpisah, sekalipun *job desk* mereka terlihat otonom, namun pola relasi antar elit harus terbangun. Hal ini untuk menjaga kelangsungan kepentingan dan keberadaan para elit jika ingin bertahan sebagai elit penentu atau posisinya akan tergeser oleh kelompok lainnya

Pola relasi antar elit dalam penambangan pasir dapat dipetakan dalam diagram sebagai berikut :

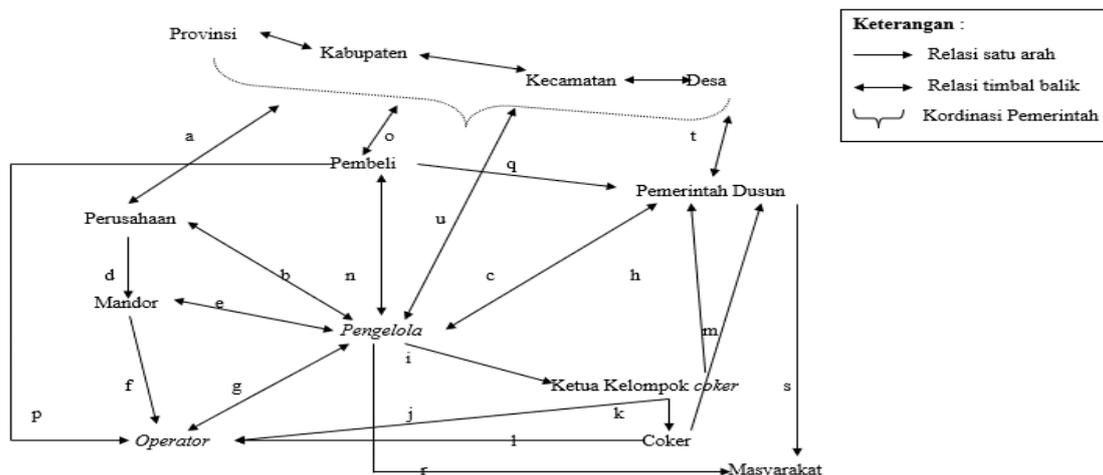


Diagram 2.1 Pola Relasi Aktor di Penambangan Kali Gendol

(Sumber : Olahan Peneliti, 2021)

penjelasan :

- a. Izin administratif sekaligus link antara pengusaha dengan pemerintah setempat
- b. Perusahaan mendatangi *pengelola* untuk membeli kapling dan menyewakan alat bego sebagai bisnisnya di wilayah penambangan

- c. *Pengelola* sebagai perantara perusahaan meminta izin beli kapling kepada pemerintah dusun untuk perusahaan. Dusun memberikan kewenangan kepada *pengelola* sebagai pihak manajerial wilayah pertambangan

- d. Perusahaan menempatkan mandor untuk mengawasi kapling yang dibelinya termasuk mengontrol penyewaan alat berat
 - e. Mandor dan Pengelola memiliki tanggungjawab perhitungan keuntungan perusahaan
 - f. Mandor mengawasi *operator* sebagai pengoperasi alat berat perusahaan. *Operator* perusahaan ada juga yang merupakan karyawan perusahaan
 - g. *Pengelola* juga memiliki kewenangan untuk menempatkan *operator* yakni diisi dengan pemuda-pemuda warga desa. *Operator* menyetor penghasilannya juga kepada *pengelola*
 - h. Masyarakat setempat yang ingin bekerja di wilayah tambang membentuk kelompok-kelompok *coker* dan meminta kapling kepada pihak dusun. i. Pihak dusun melalui *pengelola* memberikan kapling-kapling bagi kelompok *coker*
 - i. Ketua Kelompok *coker* biasanya bekerja secara manual bersama kelompoknya namun mau tidak mau harus menyewa juga *bego* untuk menghancurkan dan mengeruk material yang tidak bisa dilakukan dengan tenaga manusia dan karenanya harus membayar pada *operator*
 - j. Kelompok *coker* berada dalam komando ketua paguyuban *coker*
 - k. *Coker* juga memberikan uang sewa alat berat kepada *operator*
 - l. Selain itu, para *coker* juga diwajibkan membayar kas desa dari setiap hasil kerjanya sebesar Rp. 30.000/hari
 - m. Pihak truk pembeli memasuki wilayah tambang melalui portal yang dijaga oleh manajemen *pengelola*
 - n. Pihak truk pembeli membawa izin penambangan dalam bentuk DO yang harus melalui pemerintahan setempat
 - o,q Truk pembeli terkadang melakukan praktik *ngemal* dengan pihak *operator* untuk memperlancar muatan material dan sekaligus mendapatkan kualitas material yang terbaik
 - r. *Pengelola* juga membagikan keuntungannya setahun sekali melalui program tunjangan hari raya kepada per kepala masyarakat
 - s. Pemerintah dusun mengalokasikan dan bagi hasil dengan *pengelola* yang disimpan melalui kas untuk dana sosial bagi masyarakat
 - t. Terkait dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari hasil penambangan yang secara formal, harus tertuang dalam anggaran daerah baik di level desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Hal ini terkait dengan isu good governance yang mengisyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas.
 - u. Komunikasi dan relasi yang dijalin antara *pengelola* dengan pemerintah daerah yang secara hukum wilayah tambangnya berada dalam yuridiksi pemerintahan tersebut
- Dalam diagram di atas menunjukkan hal keteraturan manajemen penambangan pasir yang mengindikasikan adanya komunikasi intensif antara pengusaha dan pengelola sehingga tidak terlihatnya konflik soal bagi hasil. Justru pengelola menunjukkan sikap yang berlawanan dengan masyarakat. Artinya ada kecenderungan yang lebih besar bahwa

pengelola secara *rational choice* harus bisa menjaga kelangsungan hubungan komunikasi dengan pengusaha dan menjaga kepercayaan dari pengusaha yang mengejar keuntungan, karena dari hal itulah pengelola akan mampu bertahan sebagai pengelola karena bisa menjaga *link* dan bertahan sebagai pengelola karena sumber daya ekonomi yang diaturnya sangat besar. Hal yang sama ditunjukkan oleh relasi antar pengusaha dengan pemerintah yang levelnya lebih tinggi, keduanya ibarat simbiosis mutualisme menjaga kepentingan masing-masing dan saling mengamankan. Begitu juga dengan relasi antara pengelola dan pemerintah dusun/desa yang dikordinasikan secara apik agar menciptakan suasana penambangan yang kondusif dan menjaga stabilitas masyarakat dari potensi-potensi konflik yang tentunya apabila terjadi akan mengganggu kepentingan para elit tersebut. Informasi yang menarik bahwa di Dusun Jambu ini kebanyakan pengelola merupakan kerabat karena dusun ini hampir seluruh penduduknya merupakan kerabat. Sehingga hal ini memunculkan adanya homogenitas sosial masyarakat selain memunculkan rasa kekerabatan juga kesamaan ideologi setidaknya dapat menguatkan legitimasi elit dan meminilaisir konflik

KESIMPULAN

Elit merupakan suatu struktur sosial yang tidak mungkin tidak ada dalam kehidupan sosial masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern karena elit hadir diatas diferensiasi masyarakat baik dari segi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya, seperti yang ditunjukkan dalam fenomena penambangan pasir di Kali Gendol Dusun Jambu. Keberadaan elit akan ditentukan oleh basis kuasa yang berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dimana basis kuasa

tersebut akan menentukan tingkat kelas masyarakat apakah sebagai masyarakat yang berpengaruh atau yang dipengaruhi, baik itu dilihat dari modal produksi maupun fungsi dan peran yang dijalankan oleh elit tersebut. Fenomena penambangan pasir di Dusun Jambu ini keberadaan elit penguasa ada dalam klasifikasi kelas penguasa *petty bourgeois* atau *middle class*. Hal ini menegaskan asumsi Bottomore bahwa tidak satupun dalam kelompok ini secara kohesif atau cukup independen berada dalam elit penentu yang stabil. Karena pengelompokan elit penguasa berdasarkan basis kuasa organik (fisik, normatif, personal dan ahli) yang bisa saja berubah akibat proses sosial yang disebut mengalami perputaran. Hal yang dapat mempertahankan seseorang atau sekelompok orang dalam kedudukannya sebagai elit adalah soal kapasitas dan pola relasi yang dibangun atas dasar integrasi dari para elit tersebut. Semakin para elit bersepakat mengenai hegemoni yang mereka miliki semakin lama daya tahan kedudukan dari elit tersebut. Namun semakin kurangnya konsensus antar para elit maka kemungkinan konflik dan perputaran elit akan terjadi

REFERENSI

Buku

- Alfian, M. Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bottomore, T.B. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta : Akbar Tanjung Institute.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit*. Yogyakarta : Program Pascasarjana (S2) PLOD Universitas Gajah Mada.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit*

- Penentu dalam Masyarakat Modern (terjemahan)*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite*. New York City : Oxford University Press.
- Putnam, Robert. 1976. *Comparative Analysis of Social Structure*. London : Palgrave McMillan.
- Rozaki, Abdul. 2004. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*. Yogyakarta : Pustaka Marwa.
- Simon, Roger. 2000. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Hidayat, Aditya R. 2019. Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan Ilegal (Studi Tentang Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro. *Skripsi. Universitas Airlangga*.
- Taufik Hidayat , Ratih Nur Pratiwi dan Endah Setyowati. 2016.

Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 100-114

Website

- <http://muhammadikbaldede.blogspot.com/2014/08/elit-masyarakat.html>
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/12/21/510/1091417/bbwssopenambangan-pasir-merapi-masih-wajar-normal>
- <https://nasional.tempo.co/read/488670/warga-merapi-menerima-deviden-penambangan-pasir/full&view=ok>
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2014/12/04/512/557350/pasir-merapi-berapa-harga-pasir-di-lokasi-penambangan>